

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 telah tersusun. Rencana Kerja Perubahan ini memuat tentang gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Visi dan Misi serta kondisi pembangunan bidang urusan sosial tahun 2024, baik perkiraan permasalahan yang dihadapi maupun rencana upaya penanganannya.

Rencana Kerja Perubahan ini sangat diperlukan karena di samping memuat informasi prioritas pembangunan juga program maupun kegiatannya. Hal ini sebagai pedoman dalam memberi arah penanganan pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial serta upaya meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki, dan memperbaharui hasil-hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, disesuaikan dengan Rancangan Kinerja dan forum OPD tahun 2023, apakah ada usulan-usulan di dalam forum OPD yang perlu dimasukkan ke dalam Renja OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana kebijakan di bidang kesejahteraan sosial maupun masyarakat pada umumnya. Kiranya Allah SWT memberikan hikmat dan anugerah-Nya bagi kita semua.

Blitar, 9 September 2024

Pt. Kepala Dinas Sosial,



**BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19760204 199612 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB IV PENUTUP	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah manapun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah memasuki tahun anggaran berjalan pada selesai semester pertama. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) RKPD beserta hasil Musrenbang tingkat kabupaten. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

Pada hakikatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Bidang yang sangat penting, karena kesejahteraan sosial pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penataan lingkungan sosial masyarakat

yang sehat dan dinamis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Blitar hasil dari beberapa forum musyawarah perencanaan pembangunan salah satunya adalah dari forum OPD. Forum OPD merupakan salah satu forum penyerapan aspirasi masyarakat di mana di dalamnya terdapat unsur sesuai urusan bidang masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang mengacu pada hasil kinerja Perangkat Daerah dan pembangunan Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 101/D); dan

21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam tahun 2024.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan Renstra;
- b. Menjadikan Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Blitar; dan
- d. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD**

**2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

**2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II**

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 melalui analisis terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Jumlah pagu anggaran Tahun 2024 semester I Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp 13.401.076.519,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.471.750.283,00 atau sebesar 26%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp 9.929.326.236,00 atau 74%.

Dalam penganggaran tahun 2024 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Blitar melaksanakan 6 Program, 14 kegiatan, dan 45 sub kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Blitar**

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	Persentase PPKS			√	11,51	11,31	11,11	10,76	9,19	-	9,19	9,19	
2	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Desa/Kel		√	248	248	248	248	248	248	248	248	
3	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang		√	22	22	22	22	22	22	22	22	
4	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	orang		√	22	22	22	22	22	22	22	22	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(TKSK)												
5	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Layanan		√	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang		√	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin	Kelompok		√	5	5	5	5	6	5	5	5	
8	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Orang		√	628.842	628.842	628.842	628.842	624.481	663.872	628.842	628.842	
9	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang		√	153	153	153	153	128	128	128	128	Menyesuaikan edaran Dirjem Jamsos tentang Pengangkatan SDM PKH
10	Peningkatan	Lembaga		√	27	27	27	27	29	29	27	27	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos												
11	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	Orang		√	45	45	45	45	337	337	337	337	
12	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	√	√	27	27	27	27	0	63	100	100	
13	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Orang		√	200	200	400	400	400	400	400	400	
14	Jumlah korban bencana sosial		√	√	20	20	20	20	101	10	20	20	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial												
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	√	√	21	21	21	21	127	759	759	759	
16	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	√	√	1	1	1	1	5	47	47	47	
17	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	Orang	√	√	12	12	12	12	30	2.555	2.555	2.555	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	panti												

## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PPKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis PPKS.

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. Selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompentensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial seperti PSKS dan pekerja sosial. Dinas Sosial Kabupaten Blitar dituntut untuk bisa meningkatkan kecapakan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki. Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Blitar maupun Provinsi Jawa Timur dan APBN masih terbatas untuk melaksanakan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan perubahan data begitu dinamis. Di sisi lain bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial juga masih kurang dalam pembangunan bidang sosial.
4. Jumlah PPKS yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya karena jumlah PPKS sangat dinamis dan terjadi secara insidental. Fakir miskin dapat ditekan dan dikendalikan angkanya karena memiliki standar intervensi tertentu sedangkan PPKS lainnya tidak dapat ditekan karena tidak adanya intervensi khusus.
5. Minimnya kapasitas kesiapsiagaan bencana alam dan sosial sementara frekuensi / variasi bencana sangat kompleks.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan penanganan terhadap PPKS masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat tercapai dengan baik. Tiga isu strategis dari permasalahan pokok yang

dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Blitar sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang, ketiga isu tersebut yaitu:

1. Masih optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap PPKS;
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan terhadap PPKS;
3. Masih belum optimalnya pelayanan penunjang.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial Kabupaten Blitar terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, organisasi, dan tata laksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan bidang sosial secara umum dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar secara khusus.

Beberapa faktor belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut di atas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena:

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia yang bersifat pegawai tetap (ASN) yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang pekerja sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapainya standar pelayanan yang lebih prima dan optimal;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur;
- f. Belum memadainya sistem manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fisik;
- h. Belum memadainya pengelolaan aset;
- i. Belum efektifnya sistem pelayanan penunjang;
- j. Masih diperlukannya penambahan SDM yang unggul dan berkualitas.

Faktor kemiskinan juga menjadi tantangan serius Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan prioritas dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten

Blitar cenderung merata antar kecamatan. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumber daya manusia yang relatif masih rendah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah dalam bentuk:

- a. Penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PPKS dan PPKS;
- b. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
- c. Penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PPKS;
- d. Pengembangan KUBE

Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam urusan sosial. Berbagai tantangan yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar, seperti:

- a. Jejaring kerja sama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PPKS;
- b. Semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi walaupun tetap harus terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial;
- c. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti shelter PPKS yang masih memerlukan sarana dan prasarana pendukung masih harus ditingkatkan;
- d. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PPKS yang tidak potensial, seperti lanjut usia miskin dan penderita cacat berat. Selain itu

program-program penguatan kapasitas PPKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian;

- e. Peningkatan kapasitas PSKS yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

### **2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II**

Gambaran umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di bidang sosial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka visi Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengacu kepada Visi Kabupaten Blitar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur”** serta menjalankan Misi pertama yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”**.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah salah satu bahan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan laporan hasil kinerja triwulan II dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 (E-81)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Periode Pelaksanaan 2024

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENKOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	- 100	6.675.575.000,00	- 100	5.659.065.604,00	- 100	5.111.326.806,00		329.302.432,00	- 24	2.181.022.151,00	0,00	0,00	- 24	2.510.324.583,00	- 124,00	49,11	- 124	8.169.390.187,00	- 124,00	124,00	122,38	Dinas Sosial			
2	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	- 100	691.809.000,00	- 100	873.741.226,00	- 100	805.559.203,00		0,00	- 40	282.652.027,00	0,00	0,00	- 40	282.652.027,00	- 140,00	35,09	- 140	1.156.393.253,00	- 140,00	167,15	1.156.393.253,00	Dinas Sosial			
3	01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		75.000.000,00		0,00		40.500.000,00		0,00		40.400.500,00	0,00	0,00		40.400.500,00		99,75		40.400.500,00		53,87	40.400.500,00	Dinas Sosial			
4	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	- 9	2.402.000,00	- 9	3.044.200,00	- 9	1.550.448,00		0,00	- 9	0,00	0,00	0,00	- 9	0,00	- 200,00	0,00	- 18	3.044.200,00	- 200,00	126,74	3.044.200,00	Dinas Sosial			
5	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- 3	1.151.000,00	- 3	1.522.150,00	- 3	775.224,00		0,00	- 3	0,00	0,00	0,00	- 3	0,00	- 200,00	0,00	- 6	1.522.150,00	- 200,00	132,25	1.522.150,00	Dinas Sosial			
6	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 6	1.251.000,00	- 6	1.522.050,00	- 6	775.224,00		0,00	- 6	0,00	0,00	0,00	- 6	0,00	- 200,00	0,00	- 12	1.522.050,00	- 200,00	121,67	1.522.050,00	Dinas Sosial			
7	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- 100	4.479.194.000,00	- 100	3.501.253.097,00	- 100	3.582.309.939,00		329.302.432,00	- 17	1.645.066.808,00	0,00	0,00	- 17	1.974.369.240,00	- 117,00	55,11	- 117	5.475.622.337,00	- 117,00	122,25	5.475.622.337,00	Dinas Sosial			
8	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- 38	4.435.100.000,00	- 32	3.466.056.697,00	- 38	3.545.784.420,00		- 32	329.302.432,00	- 32	1.636.323.808,00	0,00	0,00	- 32	1.965.626.240,00	- 84,21	55,44	- 32,00	5.431.682.937,00	- 84,21	122,47	5.431.682.937,00	Dinas Sosial		
9	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- 6	44.094.000,00	- 6	35.196.400,00	- 6	36.525.519,00		0,00	- 1	8.743.000,00	0,00	0,00	- 1	8.743.000,00	- 116,67	23,94	- 7	43.939.400,00	- 116,67	99,65	43.939.400,00	Dinas Sosial			
10	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	- 100	691.809.000,00	- 100	873.741.226,00	- 100	805.559.203,00		0,00	- 40	282.652.027,00	0,00	0,00	- 40	282.652.027,00	- 140,00	35,09	- 140	1.156.393.253,00	- 140,00	167,15	1.156.393.253,00	Dinas Sosial			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Kl	Kr	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
11	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 12	88.130.000,00	- 12	78.049.200,00	- 12	65.021.169,00		0,00	- 6	15.305.400,00	0,00	0,00	- 6	15.305.400,00	- 150,00	23,54	- 18	93.354.600,00	- 150,00	105,93	93.354.600,00	Dinas Sosial		
12	1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- 12	25.513.000,00	- 12	31.163.750,00	- 12	19.303.899,00		0,00	- 6	5.674.950,00	0,00	0,00	- 6	5.674.950,00	- 150,00	29,40	- 18	36.838.700,00	- 150,00	144,39	36.838.700,00	Dinas Sosial		
13	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 100	13.166.000,00	- 100	42.310.500,00	- 100	14.739.135,00		0,00	- 8	1.200.000,00	0,00	0,00	- 8	1.200.000,00	- 108,00	8,14	- 108	43.510.500,00	- 108,00	330,48	43.510.500,00	Dinas Sosial		
14	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- 12	10.000.000,00	- 12	15.954.075,00	- 12	7.288.000,00		0,00	- 3	2.390.000,00	0,00	0,00	- 3	2.390.000,00	- 125,00	32,79	- 15	18.344.075,00	- 125,00	183,44	18.344.075,00	Dinas Sosial		
15	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 48	555.000.000,00	- 48	706.263.701,00	- 48	699.207.000,00		0,00	- 18	258.081.677,00	0,00	0,00	- 18	258.081.677,00	- 137,50	36,91	- 66	964.345.378,00	- 137,50	173,76	964.345.378,00	Dinas Sosial		
16	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	- 50	228.616.000,00	- 50	421.660.000,00	- 50	102.984.801,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 100,00	0,00	- 50	421.660.000,00	- 100,00	184,44	421.660.000,00	Dinas Sosial		
17	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- 50	228.616.000,00	- 50	421.660.000,00	- 50	102.984.801,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 100,00	0,00	- 50	421.660.000,00	- 100,00	184,44	421.660.000,00	Dinas Sosial		
18	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	- 5	516.677.000,00	- 5	580.318.519,00	- 5	487.276.000,00		0,00	- 4	157.476.166,00	0,00	0,00	- 4	157.476.166,00	- 180,00	32,32	- 9	737.794.685,00	- 180,00	142,80	737.794.685,00	Dinas Sosial		
19	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 550	6.045.000,00	- 550	7.000.000,00	- 550	5.722.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 100,00	0,00	- 550	7.000.000,00	- 100,00	115,80	7.000.000,00	Dinas Sosial		
20	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 3	75.256.000,00	- 3	67.894.047,00	- 3	69.914.000,00		0,00	- 3	28.753.949,00	0,00	0,00	- 3	28.753.949,00	- 100,00	41,13	- 3,00	96.647.996,00	- 100,00	128,43	96.647.996,00	Dinas Sosial		
21	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 15	435.376.000,00	- 15	505.424.472,00	- 15	411.640.000,00		0,00	- 5	128.722.217,00	0,00	0,00	- 5	128.722.217,00	- 133,33	31,27	- 20	634.146.689,00	- 133,33	145,65	634.146.689,00	Dinas Sosial		
22	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	- 77	681.877.000,00	- 77	279.048.562,00	- 77	91.146.415,00		0,00	- 13	55.426.650,00	0,00	0,00	- 13	55.426.650,00	- 116,88	60,81	- 90	334.475.212,00	- 116,88	49,05	334.475.212,00	Dinas Sosial		
23	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 26	301.183.000,00	- 26	185.295.067,00	- 26	0,00		0,00	- 7	47.906.650,00	0,00	0,00	- 7	47.906.650,00	- 126,92		- 33	233.201.717,00	- 126,92	77,43	233.201.717,00	Dinas Sosial		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
24	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 50	89.948.000,00	- 50	49.006.200,00	- 50	63.300.000,00	0,00	- 5	7.520.000,00	0,00	0,00	- 5	7.520.000,00	- 110,00	11,88	- 55	56.526.200,00	- 110,00	62,84	56.526.200,00	Dinas Sosial			
25	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 1	290.746.000,00	- 1	44.747.295,00	- 1	27.846.415,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 50,00	0,00	- 0,50	44.747.295,00	- 50,00	15,39	44.747.295,00	Dinas Sosial			
26	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	- <b>Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat</b>	- 100	2.954.459.945,00	- 100	2.375.067.784,00	- 100	1.338.839.384,00	- 25	0,00	- 25	244.098.100,00	0,00	0,00	- 50	244.098.100,00	- 150,00	18,23	- 150	2.619.165.884,00	- 150,00	150,00	88,65	Dinas Sosial		
27	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- <b>persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kejadiannya</b>	- 75	34.551.000,00	- 13	2.155.000,00	- 75	2.400.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	- 17,33	0,00	- 13	2.155.000,00	- 17,33	6,24	2.155.000,00	Dinas Sosial			
28	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- 75	34.551.000,00	- 13	2.155.000,00	- 75	2.400.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	- 17,33	0,00	- 13	2.155.000,00	- 17,33	6,24	2.155.000,00	Dinas Sosial			
29	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- <b>persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</b>	- 100	2.919.908.945,00	- 100	2.372.912.784,00	- 100	1.336.439.384,00		0,00	- 31	244.098.100,00	0,00	0,00	- 31	244.098.100,00	- 131,00	18,26	- 131	2.617.010.884,00	- 131,00	89,63	2.617.010.884,00	Dinas Sosial		
30	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- 22	69.227.000,00	- 22	15.441.800,00	- 22	7.598.600,00		0,00		0,00	0,00		0,00	- 100,00	0,00	- 22	15.441.800,00	- 100,00	22,31	15.441.800,00	Dinas Sosial			
31	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- 22	272.989.000,00	- 22	185.140.200,00	- 22	248.594.250,00	- 22	0,00	- 22	65.000.000,00	0,00	0,00	- 22	65.000.000,00	- 100,00	26,15	- 22,00	250.140.200,00	- 100,00	91,63	250.140.200,00	Dinas Sosial		
32	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- 27	2.441.884.945,00	- 29	2.164.010.784,00	- 27	1.072.133.334,00		0,00	- 5	179.098.100,00	0,00	0,00	- 5	179.098.100,00	- 125,93	16,70	- 34	2.343.108.884,00	- 125,93	95,95	2.343.108.884,00	Dinas Sosial		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	K1	Kr	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16			
33	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- 17	135.808.000,00	- 17	8.320.000,00	- 17	8.113.200,00									0,00	-	100,00	0,00	- 17		8.320.000,00	-	100,00	6,13	8.320.000,00	Dinas Sosial	
34	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	- Persentase Warga Negara Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	- 100	150.000.000,00		0,00	- 100	4.948.870,00									0,00	- 0,00	0,00			0,00		- 0,00	0,00		0,00	Dinas Sosial	
35	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	- 100	150.000.000,00		0,00	- 100	4.948.870,00									0,00	- 0,00	0,00			0,00		- 0,00	0,00		0,00	Dinas Sosial	
36	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100	150.000.000,00	- 100	0,00	- 100	4.948.870,00									0,00	-	100,00	0,00	- 100		0,00	-	100,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	
37	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	- 100	1.088.827.688,00	- 100	232.353.750,00	- 100	839.452.072,00	- 6		0,00	- 5	30.611.000,00				0,00	- 11	30.611.000,00	-	111,00	3,65	- 111	262.964.750,00	-	111,00	111,00	24,15	Dinas Sosial
38	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- 1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	- 100	768.775.310,00	- 100	138.583.750,00	- 100	744.198.777,00	- 6		0,00	- 5	10.391.000,00				0,00	- 11	10.391.000,00	-	111,00	1,40	- 111	148.974.750,00	-	111,00	19,38	148.974.750,00	Dinas Sosial
39	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	- Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di fasilitasi	- 5	10.000.000,00		0,00	- 5	3.555.000,00				- 2	480.000,00				0,00	- 2	480.000,00	-	40,00	13,50	- 2	480.000,00	-	40,00	4,80	480.000,00	Dinas Sosial
40	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- 200	249.445.000,00	- 85	55.544.250,00	- 200	29.767.800,00	- 18		0,00	- 3	5.290.000,00				0,00	- 21	5.290.000,00	-	53,00	17,77	- 106	60.834.250,00	-	53,00	24,39	60.834.250,00	Dinas Sosial

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Kl	Kr	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
41	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- 30	10.000.000,00	- 35	4.985.000,00	- 30	5.880.225,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 116,67	0,00	- 35	4.985.000,00	- 116,67	49,85	4.985.000,00	Dinas Sosial
42	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- 15	30.000.000,00		0,00	- 177	651.187.827,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 0,00	0,00		0,00	- 0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
43	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- 40	419.330.310,00	- 40	30.444.500,00	- 40	34.887.925,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 100,00	0,00	- 40	30.444.500,00	- 100,00	7,26	30.444.500,00	Dinas Sosial
44	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	- 10	10.000.000,00	- 9	2.240.000,00	- 10	5.075.000,00	- 5	0,00	- 4	1.440.000,00		0,00	- 9	1.440.000,00	- 180,00	28,37	- 18	3.680.000,00	- 180,00	36,80	3.680.000,00	Dinas Sosial		
45	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	- 20	30.000.000,00	- 33	35.670.000,00	- 20	7.300.000,00	- 8	0,00	- 7	1.440.000,00		0,00	- 15	1.440.000,00	- 240,00	19,73	- 48	37.110.000,00	- 240,00	123,70	37.110.000,00	Dinas Sosial		
46	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- 20	10.000.000,00	- 20	9.700.000,00	- 20	6.545.000,00	- 1	0,00	- 7	1.741.000,00		0,00	- 8	1.741.000,00	- 140,00	26,60	- 28	11.441.000,00	- 140,00	114,41	11.441.000,00	Dinas Sosial		
47	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- 4	320.052.378,00	- 4	93.770.000,00	- 4	95.253.295,00	- 4	0,00	- 4	20.220.000,00		0,00	- 4	20.220.000,00	- 100,00	21,23	- 4,00	113.990.000,00	- 100,00	35,62	113.990.000,00	Dinas Sosial		
48	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100	63.336.378,00	- 122	65.970.000,00	- 100	57.000.000,00	- 34	0,00	- 27	17.280.000,00		0,00	- 61	17.280.000,00	- 183,00	30,32	- 183	83.250.000,00	- 183,00	131,44	83.250.000,00	Dinas Sosial		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
49	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	- Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	- 100	88.290.000,00	- 20	9.400.000,00	- 100	17.778.295,00	- 7	0,00	- 7	1.440.000,00	0,00	0,00	- 14	1.440.000,00	- 34,00	8,10	- 34	10.840.000,00	- 34,00	12,28	10.840.000,00	Dinas Sosial		
50	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- 30	20.000.000,00	0,00	0,00	- 30	3.950.000,00	0,00	- 4	0,00	0,00	0,00	- 4	0,00	- 13,33	0,00	- 4	0,00	- 13,33	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial		
51	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- 15	68.728.000,00	- 43	8.160.000,00	- 15	8.700.000,00	- 11	0,00	- 5	0,00	0,00	0,00	- 16	0,00	- 393,33	0,00	- 59	8.160.000,00	- 393,33	11,87	8.160.000,00	Dinas Sosial		
52	1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- 2	79.698.000,00	- 2	10.240.000,00	- 2	7.825.000,00	0,00	- 2	1.500.000,00	0,00	0,00	- 2	1.500.000,00	- 100,00	19,17	- 2,00	11.740.000,00	- 100,00	14,73	11.740.000,00	Dinas Sosial			
53	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	- 100	1.346.180.687,00	- 100	5.726.719.426,00	- 100	5.693.790.262,00	- 100	0,00	- 100	678.631.000,00	0,00	0,00	- 100	678.631.000,00	- 100,00	11,92	- 100,00	6.405.350.426,00	- 100,00	100,00	475,82	Dinas Sosial		
54	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- persentase DTKS, PBI JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	- 100	1.346.180.687,00	- 100	5.726.719.426,00	- 100	5.693.790.262,00	- 100	0,00	- 100	678.631.000,00	0,00	0,00	- 100	678.631.000,00	- 100,00	11,92	- 100,00	6.405.350.426,00	- 100,00	475,82	6.405.350.426,00	Dinas Sosial		
55	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- 562076	902.518.000,00	- 562076	378.511.326,00	- 562076	107.445.042,00	- 562076	0,00	- 562076	9.533.000,00	0,00	0,00	- 562076	9.533.000,00	- 100,00	8,87	- 562076,00	388.044.326,00	- 100,00	43,00	388.044.326,00	Dinas Sosial		
56	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- 9600	393.662.687,00	- 9600	5.268.728.100,00	- 9600	5.491.425.220,00	- 9600	0,00	- 9600	583.618.000,00	0,00	0,00	- 9600	583.618.000,00	- 100,00	10,63	- 9600,00	5.852.346.100,00	- 100,00	1.486,64	5.852.346.100,00	Dinas Sosial		
57	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- 50	50.000.000,00	- 50	79.480.000,00	- 50	94.920.000,00	0,00	- 50	85.480.000,00	0,00	0,00	- 50	85.480.000,00	- 100,00	90,05	- 50,00	164.960.000,00	- 100,00	329,92	164.960.000,00	Dinas Sosial			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Kl	Kr	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
58	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	1.448.787.866,00	410.604.000,00		234.304.125,00		0,00		13.105.000,00		0,00		0,00		13.105.000,00	5,59		423.709.000,00			29,25	Dinas Sosial			
59	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	- persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	- 100	624.838.866,00	- 67	204.504.000,00	- 100	105.782.125,00	- 5	0,00	- 2	10.480.000,00	0,00	0,00	- 7	10.480.000,00	- 74,00	9,91	- 74	214.984.000,00	- 74,00	34,41	214.984.000,00	Dinas Sosial		
60	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- 1000	564.838.866,00	- 101	192.504.000,00	- 1000	84.826.565,00	- 68	0,00	- 6	10.480.000,00	0,00	0,00	- 74	10.480.000,00	- 17,50	12,35	- 175	202.984.000,00	- 17,50	35,94	202.984.000,00	Dinas Sosial		
61	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia ada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100	15.000.000,00		5.950.000,00	- 100	8.136.300,00		0,00	- 15	0,00	0,00	0,00	- 15	0,00	- 15,00	0,00	- 15	5.950.000,00	- 15,00	39,67	5.950.000,00	Dinas Sosial		
62	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100	30.000.000,00		2.000.000,00	- 100	8.902.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 0,00	0,00		2.000.000,00	- 0,00	6,67	2.000.000,00	Dinas Sosial		
63	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- 100	15.000.000,00		4.050.000,00	- 100	3.917.060,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 0,00	0,00		4.050.000,00	- 0,00	27,00	4.050.000,00	Dinas Sosial		
64	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	- persentase Masyarakat Terhadap terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	- 40	823.949.000,00	- 47	206.100.000,00	- 40	128.522.000,00	- 47	0,00	- 47	2.625.000,00	0,00	0,00	- 47	2.625.000,00	- 117,50	2,04	- 47,00	208.725.000,00	- 117,50	25,33	208.725.000,00	Dinas Sosial		
65	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	- Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- 4	380.599.000,00	- 10	10.155.000,00	- 4	14.972.000,00	- 10	0,00	- 10	0,00	0,00	0,00	- 10	0,00	- 250,00	0,00	- 10,00	10.155.000,00	- 250,00	2,67	10.155.000,00	Dinas Sosial		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
66	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- 44	443.350.000,00	- 44	195.945.000,00	- 44	113.550.000,00	- 44	0,00	- 44	2.625.000,00	0,00	0,00	- 44	2.625.000,00	- 100,00	2,31	- 44,00	198.570.000,00	- 100,00	44,79	198.570.000,00	Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja Program																					80,83%	123,37%					
Predikat Kinerja Program																					Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					106,90%	110,40%					
Predikat Kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah ditetapkan capaian target kinerjanya dalam 5 (lima) tahun, jika pada tahun yang bersangkutan capaian kinerja tidak bisa diwujudkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka hal ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.

Jika setiap tahun masih ada kegiatan yang tidak tercapai selama kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian program Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, dengan arti program/kegiatan yang telah ditetapkan selama 5 tahun melalui Renstra tidak tercapai sekaligus hal ini akan berpengaruh kepada capaian RPJMD Kabupaten Blitar.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a. Agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBD Perubahan yang telah ditetapkan setiap tahunnya maka alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan tidak dilakukan pengurangan anggaran (efisiensi) karena pada awal penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada setiap kegiatan telah mengkaji berbagai aspek untuk mendukung kegiatan tersebut.
- b. Perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan manfaat tenaga kesejahteraan sosial untuk mendukung seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- c. Perlu alokasi dana yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi pada kegiatan tersebut.
- d. Perlu adanya peningkatan kualitas personil melalui pendidikan dan latihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi.
- e. Perlu dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan, perlindungan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PPKS.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat sub kegiatan, kegiatan, dan program yang telah memenuhi atau tidak memenuhi target kinerja yang disebabkan oleh:

**Tabel 3**  
**Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Program**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengerjaan dokumen dilaksanakan di Triwulan I		TERPENUHI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengerjaan dokumen dilaksanakan di Triwulan I		TERPENUHI
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pencairan tepat waktu		TERPENUHI
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen diselesaikan hanya di triwulan pertama	BELUM TERPENUHI
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Belum dilaksanakan pencairan	BELUM TERPENUHI
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dokumen baru diselesaikan di triwulan kedua	BELUM TERPENUHI

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belum dilaksanakan pencairan	BELUM TERPENUHI
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Belum dilaksanakan pencairan	BELUM TERPENUHI
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pencairan baru diselesaikan di triwulan kedua	BELUM TERPENUHI
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		Belum dilaksanakan pencairan	BELUM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
	Bangunan Lainnya			TERPENUHI
2	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>			
	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencairan dilaksanakan tepat waktu pada semester I		TERPENUHI
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan belum dilaksanakan separuhnya, sebagian akan dilaksanakan di triwulan ketiga dan keempat	BELUM TERPENUHI
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
3	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>			
	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah</i>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
	<i>Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>			
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Belum terdapat kasus PMI korban tindak kekerasan	BELUM TERPENUHI
4	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>			
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>			
	Penyediaan Permakanan		Keterbatasan anggaran sehingga permakanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memenuhi target RPJMD	BELUM TERPENUHI
	Penyediaan Sandang		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
	Penyediaan Alat Bantu		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Belum dilaksanakan pencairan/pelaksanaan kegiatan	BELUM TERPENUHI
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Klien rehabilitasi sosial yang ditangani cukup banyak		TERPENUHI
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Klien rehabilitasi sosial yang ditangani cukup banyak		TERPENUHI

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
	Pemberian Layanan Rujukan		Menyesuaikan dengan jumlah klien rehabilitasi sosial yang ditangani masih di bawah target	BELUM TERPENUHI
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>			
	Penyediaan Permakanan	Klien rehabilitasi sosial yang ditangani cukup banyak		TERPENUHI
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Keterbatasan anggaran sehingga permakanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memenuhi target RPJMD	BELUM TERPENUHI
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Menyesuaikan dengan jumlah klien rehabilitasi sosial yang ditangani masih di bawah target	BELUM TERPENUHI
	Pemberian Layanan Rujukan	Klien rehabilitasi sosial yang ditangani cukup banyak		TERPENUHI
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terjalin kerja sama dengan instansi lain	TERPENUHI
5	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pencairan belum dilakukan separuhnya, sebagian akan dilaksanakan di triwulan	BELUM TERPENUHI

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
			ketiga dan keempat	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Bantuan sosial belum separuhnya tersalurkan, sebagian akan disalurkan pada triwulan ketiga dan keempat sesuai dengan rencana aksi dan anggaran kas	BELUM TERPENUHI
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kegiatan telah dilaksanakan pada semester I		TERPENUHI
6	<b>Program Penanganan Bencana</b>			
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>			
	Penyediaan Makanan	Kegiatan telah dilaksanakan pada semester I		TERPENUHI
	Penyediaan Sandang		Penyaluran sandang menyesuaikan jumlah korban bencana yang membutuhkan bantuan sandang	BELUM TERPENUHI
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Belum ada bencana dalam skala tertentu yang memerlukan penanganan khusus kelompok rentan	BELUM TERPENUHI
	Pelayanan Dukungan Psikososial		Belum ada bencana dalam skala tertentu yang memerlukan LDP	BELUM TERPENUHI
	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kegiatan telah dilaksanakan pada semester I		TERPENUHI

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kategori
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan telah dilaksanakan pada semester I		TERPENUHI

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang memenuhi target di antaranya adalah:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
8. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota;
10. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
11. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Sementara itu, kegiatan yang melebihi realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan di antaranya adalah:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
5. Pemberian Layanan Kedaruratan;
6. Penyediaan Permakanan untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya;
7. Pemberian Layanan Rujukan;
8. Penyediaan Makanan; dan
9. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.

Sementara itu, kegiatan yang belum memenuhi realisasinya pada semester satu di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang;
9. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
12. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
13. Penyediaan Permakanan;
14. Penyediaan Sandang;
15. Penyediaan Alat Bantu;
16. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
17. Pemberian Layanan Rujukan;
18. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
19. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
20. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
22. Penyediaan Sandang pada program penanganan bencana;
23. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; dan
24. Pelayanan Dukungan Psikososial.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, ketercapaian kinerja dipengaruhi oleh beragam faktor baik faktor internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, di bawah ini juga digambarkan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang dapat diidentifikasi dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **a. Lingkungan Internal**

##### *1. Faktor Kekuatan Organisasi*

- a) Tersedianya kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar;
- b) Tersedianya dukungan dana daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c) Adanya kemauan kuat dari SDM di Dinas Sosial untuk menyelesaikan pekerjaan.

#### 2. *Faktor Kelemahan Organisasi*

- a) Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten untuk pelaksanaan pelayanan, khususnya Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b) Kurangnya tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi untuk pengelolaan data terutama data PPKS;

### **b. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi sehingga tidak dapat dikelola secara langsung oleh Dinas Sosial, namun dapat memengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

#### 1. *Faktor Peluang Organisasi*

- a) Harmonisnya koordinasi hubungan kerja sama Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial;
- b) Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas.

#### 2. *Faktor Tantangan Organisasi*

- a) Lemahnya koordinasi;
- b) Kurangnya SDM (personil);
- c) Kebutuhan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagian berasal dari usulan program dan kegiatan masyarakat. Realisasi usulan program kegiatan tahun 2024 dari pemangku kepentingan dan masyarakat dijabarkan sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat**

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana		Realisasi		Jenis Usulan
			Volume	Pagu (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	
1.	Bantuan modal KUBE	Ds Sumberurip Kec Doko	1 kelompok	15.000.000	1 kelompok	15.000.000	MUSRENBANG
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna)	Ds Doko	70 orang	160.384.800	0	0	MUSRENBANG
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna)	Gedung Olahraga Desa Resapombo, Kab. Blitar	70 orang	15.150.041	0	0	MUSRENBANG
4.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	RT 03/RW 02 Dusun Bulurejo, dan RT 03/RW 02 Dusun Salamrejo, Kab. Blitar	1 unit	2.702.623	0	0	MUSRENBANG
5.	Bantuan Sosial Alat Bantu Walker/ Tongkat kaki tiga	Dusun Carangkembang, Dusun Suru, Dusun Brintik, Dusun Pehdoplang , Kab.	4 kruk; 4 kursi roda; 16 alat bantu dengar	126.497.820	0	0	MUSRENBANG

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana		Realisasi		Jenis Usulan
			Volume	Pagu (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	
		Blitar					
6.	Bantuan sosial alat bantu Kruk	Dusun Jamberejo Desa Jambepawon Kecamatan Doko, Kab. Blitar	1 unit	325.008	0	0	MUSRENBANG
7.	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna)	Desa Pojok, Kab. Blitar	55 orang	88.173.700	0	0	MUSRENBANG
8.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Desa Pojok, Kab. Blitar	4 unit	10.830.492	0	0	MUSRENBANG
9.	Bantuan sosial alat bantu dengar	Kelurahan Sumberdiren, Kab. Blitar	13 unit	92.923.428	0	0	MUSRENBANG
10.	Bantuan modal KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)	Desa/Kelurahan se- Kecamatan Kademangan	1 kelompok	15.000.000	1 kelompok	15.000.000	MUSRENBANG
11.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Sanankulon, Desa Tuliskriyo, Kab. Blitar	13 unit	35.199.099	0	0	MUSRENBANG
12.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Dusun Ngadipuro, Sanankulon, Sumberjo, Kab.	6 unit	16.245.738	0	0	MUSRENBANG

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana		Realisasi		Jenis Usulan
			Volume	Pagu (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	
		Blitar					
13.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Desa Mronjo	16 unit	43.321.968	0	0	MUSRENBANG
14.	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna)	Kelurahan Kembangarum, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar	60 orang	34.458.000	60 orang	13.505.000	MUSRENBANG
15.	Bantuan modal KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)	Lingkungan Kamulan RT 002/RW 001, Kab. Blitar	1 kelompok	15.000.000	1 kelompok	15.000.000	MUSRENBANG
16.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Desa Sumbersari, Kab. Blitar	6 unit	16.245.738	6 unit	16.245.738	MUSRENBANG
17.	Bantuan sosial alat bantu dengar	Warga Desa Jati, Kab. Blitar	8 alat bantu dengar; 5 kursi roda	70.721.763	0	0	MUSRENBANG
18.	Bantuan modal KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)	Desa Wates	1 kelompok	10.000.000	0	0	MUSRENBANG
19.	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna)	Dusun Tulungrejo RT 01/RW 03, Kab. Blitar	70 orang	57.900.000	0	0	MUSRENBANG

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana		Realisasi		Jenis Usulan
			Volume	Pagu (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	
20.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Desa Tugurejo , Kab. Blitar	40 unit	108.304.920	0	0	MUSRENBANG
21.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Semua Desa dan Kelurahan	20 unit	54.152.460	0	0	MUSRENBANG
22.	Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Desa Ngeni, Kab. Blitar			0	0	MUSRENBANG
23.	Bantuan modal KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)	Gandusari Kab Blitar	1 kelompok	15.000.000	1 kelompok	15.000.000	MUSRENBANG
24.	Bantuan modal KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)	Selopuro Kab Blitar	1 kelompok	15.000.000	1 kelompok	15.000.000	MUSRENBANG
25.	LKSA MIFTAHUL HUDA	Kab Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
26.	Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar	Kab Blitar	1 lembaga	150.000.000	1 lembaga	150.000.000	HIBAH
27.	YAYASAN INSAN MADANI	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
28.	LKSA Darul Yatama Srengat	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
29.	LKS SANTA THERESIA	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
30.	LKSA MULIA INSANI	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
31.	LKSA AL-KHUSYU'	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
32.	LKSA IBNU MAS'UD	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
33.	LKSA DARUL HUDA	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
34.	DPC GERKATIN KAB BLITAR	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana		Realisasi		Jenis Usulan
			Volume	Pagu (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	
35.	DPC PERTUNI KAB BLITAR	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
36.	LKSA DARUL HIKMAH	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	HIBAH
37.	PPDI TUNAS ABADI KAB BLITAR	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	0	0	HIBAH
38.	LKSA MIFTAHUL JANNAH	Kab. Blitar	1 lembaga	15.000.000	0	0	HIBAH
39.	MUI	Kab. Blitar	1 lembaga	150.000.000	0	0	HIBAH

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, Dinas Sosial telah menyusun penyesuaian terhadap perubahan rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2024. Atas dasar adanya penyesuaian dan sinkronisasi program/kegiatan dengan RKPD Kabupaten Blitar serta penyesuaian dengan pencapaian target dan pendanaannya, kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - d) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

### I. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

### II. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

a) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

## C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

### I. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

a) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

## D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

### I. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

a) Penyediaan Permakanan

b) Penyediaan Sandang

c) Penyediaan Alat Bantu

d) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

e) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

f) Pemberian Layanan Kedaruratan

g) Pemberian Layanan Rujukan

### II. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

a) Penyediaan Permakanan

- b) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  - c) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - d) Pemberian Layanan Rujukan
  - e) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
- E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- I. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- I. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - a) Penyediaan Makanan
    - b) Penyediaan Sandang
    - c) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
    - d) Pelayanan Dukungan Psikososial
  - II. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
    - a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
    - b) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun dengan mempedomani perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan ini memuat arah dan kebijakan Dinas Sosial selama tahun 2024 dan menjadi dasar perumusan kegiatan. Output Renja Dinas Sosial adalah program tahunan Dinas Sosial yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Sosial.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024 bagi seluruh jajaran Dinas Sosial. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Adapun Renja Dinas Sosial dan pendanaannya sebagaimana tabel di bawah berikut:

Tabel 5

## Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>					<b>13.890.985.682</b>	<b>13.401.076.519</b>	<b>(489.909.163)</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.779.630.969</b>	<b>5.296.087.166</b>	<b>(483.543.166)</b>
<b>I</b>	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1.550.448</b>	<b>1.550.448</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	775.224	775.224	0
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	775.224	775.224	0

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.072.219.102</b>	<b>3.581.289.939</b>	<b>(490.929.163)</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	30	4.035.693.583.	3.545.784.420	(489.909.163)
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	36.525.519	35.505.519	(1.020.000)
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>846.059.203</b>	<b>870.783.363</b>	<b>24.724.160</b>
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	65.021.169	65.021.324	155
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	19.303.899	19.303.899	0
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2	2	14.739.135	15.733.140	994.005

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penggandaan yang Disediakan	Penggandaan yang Disediakan					
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	7.288.000	12.888.000	5.600.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	699.207.000	717.337.000	18.130.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	40.500.000	40.500.000	0
<b>IV</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i></b>	<b><i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i></b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>102.984.801</b>	<b>107.448.391</b>	<b>4.463.590</b>
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	50	102.984.801	107.448.391	4.463.590
<b>V</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi</i></b>	<b><i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi</i></b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>487.276.000</b>	<b>464.023.610</b>	<b>(23.252.390)</b>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550	550	5.722.000	4.000.000	1.722.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	69.914.000	66.989.000	(2.925.000)
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15	411.640.000	393.034.610	(18.605.390)
<b>VI</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i></b>	<b><i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i></b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>269.541.415</b>	<b>270.991.415</b>	<b>1.450.000</b>
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	26	26	178.395.000	178.395.000	0

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jabatan	Pajaknya	Pajaknya					
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	63.300.000	64.750.000	1.450.000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	27.846.415	27.846.415	0
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.338.859.384</b>	<b>1.338.859.043</b>	<b>(341)</b>
<b>VII</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya</b>	<b>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.754.600</b>	<b>354.600</b>
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	75	75	2.400.000	2.754.6000	354.600

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengumpulan Uang atau Barang	Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					
<b>VIII</b>	<b><i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i></b>	<b><i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.336.459.384</b>	<b>1.336.104.443</b>	<b>(354.941)</b>
19	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22	22	7.598.600	7.404.905	(193.695)
20	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	22	22	248.594.250	248.464.635	(129.615)

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27	27	1.072.133.334	1.072.234.903	101.569
22	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	17	17	8.133.200	8.000.000	(133.200)
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.948.870</b>	<b>1.600.000</b>	<b>(3.348.870)</b>
<b>IX</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.948.870</b>	<b>1.600.000</b>	<b>(3.348.870)</b>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal</i>	<i>di fasilitasi</i>	<i>di fasilitasi</i>					
23	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	4.948.870	1.600.000	(3.348.870)
<b>D</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<i>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	<i>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>839.452.072</b>	<b>839.397.175</b>	<b>(54.897)</b>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100	100	744.198.777	739.643.880	4.554.897
24	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200	200	29.767.800	32.167.800	2.400.000
25	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	30	30	5.880.225	1.000.000	(4.880.225)

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
26	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	177	177	651.187.827	651.187.827	0
27	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	34.887.925	34.893.253	5.328
28	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	5.075.000	5.075.000	0
29	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	5	5	3.555.000	1.475.000	2.080.000

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					
30	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	7.300.000	7.300.000	0
31	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	6.545.000	6.545.000	0
<b>XI</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>95.253.295</b>	<b>99.753.295</b>	<b>4.500.000</b>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>					
32	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	57.000.000	61.500.000	4.500.000
33	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	17.778.295	17.778.295	0
34	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	30	30	3.950.000	3.950.000	0

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
35	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	8.700.000	8.700.000	0
36	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	2	7.825.000	7.825.000	0
<i>E</i>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<i>Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi</i>	<i>Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5.693.790.262</i>	<i>5.693.790.230</i>	<i>(32)</i>
<i>XII</i>	<i>Pengelolaan Data Fakir</i>	<i>Persentase DTKS, PBI-</i>	<i>Persentase DTKS, PBI-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5.693.790.262</i>	<i>5.693.790.230</i>	<i>(32)</i>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi</i>	<i>JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi</i>					
37	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	562.076	562.076	107.445.042	634.478.610	527.033.568
38	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.600	9.600	5.491.425.220	4.964.391.620	(527.033.600)
39	Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	94.920.000	94.920.000	0
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>234.304.125</b>	<b>231.342.905</b>	<b>(2.961.220)</b>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BENCANA</b>	<i>sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</i>	<i>sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</i>					
<b>XIII</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105.782.125</b>	<b>93.576.625</b>	<b>(12.205.500)</b>
40	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kabupaten/Kota	1.000	1.000	84.826.565	84.826.565	0
41	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	100	100	8.136.300	2.199.000	5.937.300

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					
42	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	8.902.200	2.634.000	(6.268.200)
43	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	3.917.060	3.917.060	0
<i>XIV</i>	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>	<i>Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>128.522.000</i>	<i>137.766.280</i>	<i>9.244.280</i>

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	14.972.000	26.916.280	11.944.280
45	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	113.550.000	110.850.000	(2.700.000)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerja sama seluruh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan dengan memperhatikan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Perubahan Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
5. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk kelancaran dan berdayagunanya suatu program/kegiatan sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas di bidang pengawasan, baik pengawas struktural maupun pengawas fungsional dan masyarakat.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar ke depannya.

Blitar, 9 September 2024  
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,



**BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760204199612 1 001